

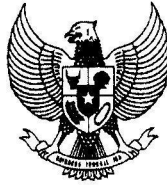


**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 209 TAHUN 2019  
TENTANG  
AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa tujuan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berintegritas dan mampu melayani publik secara profesional yang dilakukan melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai;
- b. bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berintegritas dan profesional diperlukan agen perubahan sebagai pelopor perubahan sekaligus menjadi teladan berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan unit kerjanya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
3. Peraturan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4a Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai *Role Model* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 999);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

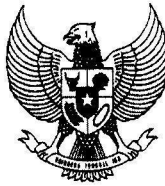
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan agen perubahan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan
- e. menghubungkan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

e. menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 209 TAHUN 2019  
TENTANG  
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

**AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Nama	Unit kerja
1.	Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, MM	Sekretariat Kementerian
2.	Ir. Agustina Erni, M.Sc	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
3.	Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.S., Ph.D.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
4.	Nahar, SH, MSi	Deputi Bidang Perlindungan Anak
5.	Dra. Leny Nurhayanti Rosalin, M.Sc	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
6.	Indra Gunawan, S.K.M., M.A.	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
7.	Titi Eko Rahayu, S.E., M.A.P.	Staf Ahli Menteri
8.	Rini Handayani, SE.MM	Staf Ahli Menteri
9.	Ratna Susianawati, SH, MH	Staf Ahli Menteri
10.	Dra. Dyah Elvina	Inspektorat
11.	Ambarwati, S.E., MM.	Sekretariat Kementerian
12.	Fakih Usman, S.Sos., ME.	Sekretariat Kementerian
13.	Margareth Robin Korwa, SH, MH.	Sekretariat Kementerian
14.	drg. Dewi Respatiningsih	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
15.	Rr. Endah Sri Rejeki, S.E, M.IDEA, Ph.D	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
16.	Muhammad Ihsan, S.Ag, MA.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17.	Budi Mardaya, S.E, M. Si.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
18.	Dra. Niken Kiswandari, Msi.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
19.	Ir. Prijadi Santoso, M.Si	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
20.	Ir. Destri Handayani, ME	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
21.	Drs. Rafail Walangitan, MA	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
22.	Ali Khasan, S.H., M.Si.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
23.	Nyimas Aliah, S.E., S.Sos, M.IKom	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
24.	Drs. Dermawan, M. Si.	Deputi Bidang Perlindungan Anak
25.	Ciput Eka Purwianti, S.Si. MA.	Deputi Bidang Perlindungan Anak
26.	Hasan, S.H.	Deputi Bidang Perlindungan Anak
27.	Usman Basuni, S.E. MA. MPHR.	Deputi Bidang Perlindungan Anak
28.	Dra. Valentina Gintings, M.Si	Deputi Bidang Perlindungan Anak
29.	Dra. Eko Novi Ariyanti R.D., M.Si.	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
30.	Dr. Ir. Lies Rosdianty, M.Si.	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
31.	Rohika Kurniadi Sari, S.H. M.Si.	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
32.	Drs. Hendra Jamal's, M.Si	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
33.	Dra. Elvi Hendrani	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
34.	Dr. Entos, SP, MPH	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
35.	Sri Prihantini Lestari Wijayanti, SH, MH	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
36.	Drs. Fatahillah, M.Si	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
37.	Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si.	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
38.	Elita Gafar, SE, MM	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
39.	Suhaeni, S.Sos.	Sekretariat Kementerian
40.	Ir. Agus Wiryanto, M.Si.	Sekretariat Kementerian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

41.	Frangky Tilung, ST	Sekretariat Kementerian
42.	Prita Ismayani Sriwidyarti, S.Sos.MT	Sekretariat Kementerian
43.	Vrandaromez, SP.	Sekretariat Kementerian
44.	Nani Dwi Wahyuni, SE.MIS	Sekretariat Kementerian
45.	Dwi Budi Prasetyo, SE, M.Si	Sekretariat Kementerian
46.	Sylvianti Angraini, S.Si.	Sekretariat Kementerian
47.	Drs. Budi Hartono, M.Si	Sekretariat Kementerian
48.	Sudarmadji, SE	Sekretariat Kementerian
49.	Ratna Oeni Cholifah,SE, MM	Sekretariat Kementerian
50.	Lydia Agnes Gultom, S.Psi	Sekretariat Kementerian
51.	Adelia Amanda, SE	Sekretariat Kementerian
52.	Prasetyatiningsih	Sekretariat Kementerian
53.	R. Ahmad Affandi	Sekretariat Kementerian
54.	Setiorini, SKM	Sekretariat Kementerian
55.	Lucia Yulianti	Sekretariat Kementerian
56.	Yeyep Mulyana, S.H.,M.H.	Sekretariat Kementerian
57.	Yudha Priasuharyo, SH	Sekretariat Kementerian
58.	Dwi Ratna Anugrah	Sekretariat Kementerian
59.	Siti Murtinah, S. Sos.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
60.	Siti Mardiah, S.Pt. M.Si.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
61.	Ratih Rachmawati,S.Sos	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
62.	Chusnul Mahfudhoh Rifatin	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
63.	Dian Rahmawati, S.Sos	Deputi Bidang Perlindungan Anak
64.	Kasih Anggraeni, S.Kom	Deputi Bidang Perlindungan Anak
65.	Chairini Putri Azhari	Deputi Bidang Perlindungan Anak
66.	Dhian Ningrum Sulistiawati	Deputi Bidang Perlindungan Anak
67.	Anggin Nuzula Rahma, S.Sos	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
68.	Shintya Deni Putri	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
69.	Susanti, S.Sos. MAP.	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

70.	Santi Herlina Zaenab, S.E., MM.	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
71.	Drs. H. Dodi Mohamad Hidayat, M.Kom.I	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
72.	Muhamad Soleh, S.E.	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
73.	Ririn Afitri Tatu	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
74.	Dra. Atjeu Janestri	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
75.	Dwi Jalu Atmanto	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
76.	Anggun Tri Kusumawati, S. Sos	Inspektorat
77.	Kartika Mayasari, SE	Inspektorat
78.	Devy Nia Pradika, SE	Inspektorat
79.	Indah Mutiara Hati, SE	Inspektorat
80.	Sandi Tri Leksono, SE	Inspektorat
81.	Lu'Lu Nurrahiimah Assyahidah	Inspektorat
82.	Rosandra Deby	Inspektorat

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 